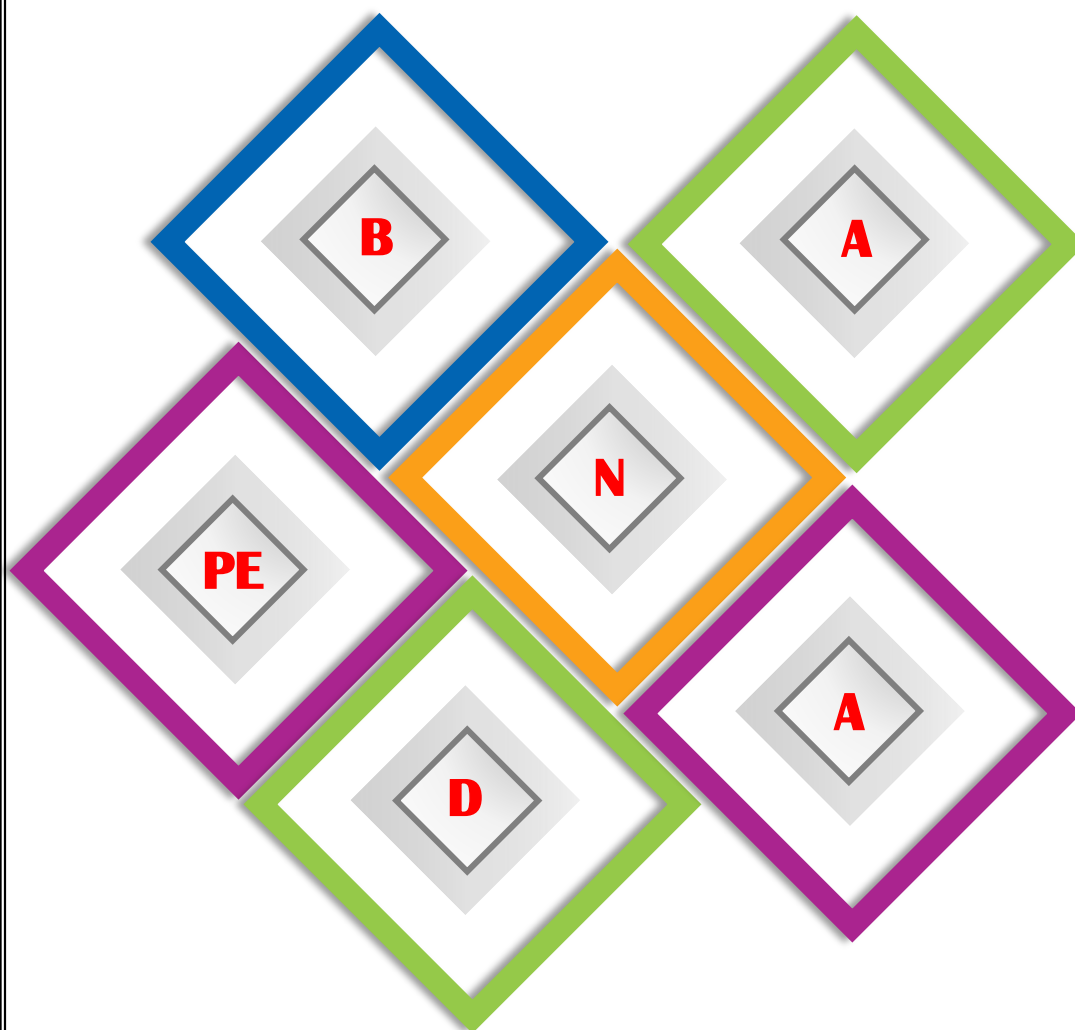




BAPENDA
SUMATERA SELATAN



RENCANA AKSI ATAS KINERJA TAHUN 2026

**BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN JL. POM IX KAMPUS PALEMBANG**

TELP. 0711 – 310633 FAX 0711 – 319819 KODE POS 30137



A. Latar Belakang

Dokumen rencana aksi kinerja yang disusun ini merupakan bentuk kesinambungan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 sebagai bahan evaluasi atas pencapaian kinerja tahun 2025, perlu ada evaluasi dan analisa terhadap kinerja yang masih kurang untuk perbaikan di tahun 2026.

Konsep pembangunan terstruktur dan terintegrasi dalam bernegara mencakup aspek yang luas mulai dari penataan fungsi urusan pemerintahan, kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tata laksana yang jelas dan transparan, didukung oleh Human Capital aparatur yang profesional, berkualitas kepada mitra kerja (stakeholder), sampai kepada adanya pengendalian intern, pengelolaan atas risiko serta pengawasan yang profesional serta menghasilkan pelayanan prima. Secara dimensi operasional, kegiatan penyelenggaraan *good governance* dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

Praktik baik dalam penyelenggaraan *good governance* dalam pengelolaan administrasi pelayanan publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan responsibilitas pemerintah terhadap tuntutan dan ekspektasi masyarakat mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban akuntabilitas yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif

dan efisien, bersih, bertanggungjawab, dan bebas dari KKN. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan asas akuntabilitas yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan rencana aksi kinerja ini adalah sebagai dasar untuk suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan yang ada dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis.

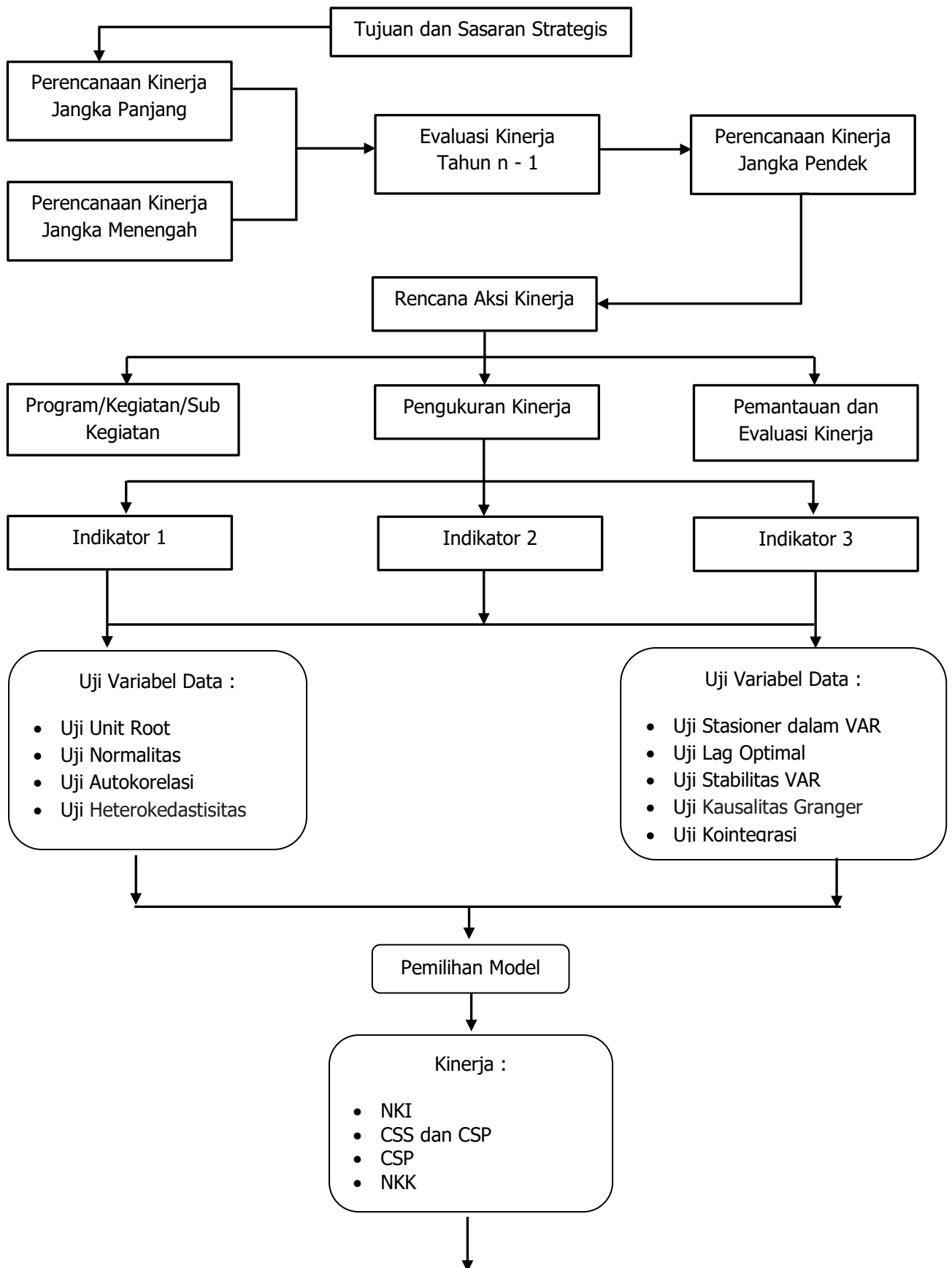
Sementara tujuan dari penyusunan rencana aksi kinerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja atas aspek implementasi dan aspek manfaat dalam pengelolaan keuangan daerah untuk penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup rencana aksi kinerja ini meliputi tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja utama, program/kegiatan/sub kegiatan serta kebutuhan dana definitif sebagai alat/proses untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai dengan *cascading* pohon kinerja.

D. Kerangka Logis

Rencana aksi ini disusun berdasarkan kerangka logis sebagai berikut :



E. Dasar Pelaksanaan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 060/047/SE/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.



A. Gambaran Pelayanan Kinerja

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja;
2. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah;
3. Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, tata usaha, umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
4. Pengkoordinasian yang meliputi segala usaha yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan asli daerah;
5. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur serta perundang-undangan yang berlaku;
6. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
7. Pembinaan terhadap UPTB; dan
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 - 2029 menjadi bagian evaluasi untuk RPJMD dan Renstra tahun 2025 – 2029 dalam rangka

memperkuat stabilitas keuangan daerah provinsi untuk mendanai pembangunan yang menjadi prioritas daerah dan merupakan salah satu dari Prioritas Pembangunan Daerah di dalam RPJMD tahun 2025 - 2029. Prioritas Pembangunan Daerah tidak terlepas dari tujuan dan sasaran RPJMD, tujuan dan sasaran strategis Renstra Badan Pendapatan Daerah berdasarkan pada tematik [1]. Prioritas Daerah, [2]. Program Prioritas Daerah dan [3]. Kegiatan Prioritas Daerah. Adapun tematik dimaksud tergambar pada tabel berikut :

PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	Sumatera Selatan Berintegritas dan Melayani	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Seiring dengan tujuan dan sasaran RPJMD, dan tujuan dan sasaran Strategis Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 – 2029, target kinerja untuk pendanaan Prioritas Pembangunan Daerah yang akan diwujudkan dalam kerangka memperkuat stabilitas keuangan daerah untuk layanan pembangunan yang berkualitas ditunjukkan sebagaimana tabel kinerja dan pendanaan Renstra Badan Pendapatan Daerah. Beberapa hal yang masih memerlukan percepatan antara lain akses layanan wajib pajak dipermudah, pemerataan pelayanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Sumatera Selatan untuk mendorong perkembangan demografi kependudukan seiring dengan urbanisasi di Sumatera Selatan.

Penetapan indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 2025–2029 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		JENIS INDIKATOR	TARGET 2026
	Tujuan: Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah		IKU	2,02
1.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>Revenue Mobilization</i>)		IKU	6,00
2.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah		IKU	0,458
3.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD		IKU	1,28
4.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB		IKU	1,252
5.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah		IKU	49,89
6.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)		IKU	92,21
7.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	1.	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	IKU	0,98
		2.	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	IKU	1,18

2. Indikator Kinerja Sasaran Intermediate Outcomes Level 1 Eselon III

a. Bidang Pajak

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		JENIS INDIKATOR	TARGET 2026
1.	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap GDP		Indikator Kinerja Outcomes	1,73 %
2.	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Subjek Pajak Daerah		Indikator Kinerja Outcomes	14,81 %
3.	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak		Indikator Kinerja Outcomes	5,02 %
4.	Berkurangnya Kesalahan Dalam	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan		Indikator Kinerja	100 %

	Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	pajak	Outcomes	
--	---------------------------------	-------	----------	--

b. Bidang Pendapatan Lain lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET 2026
1.	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	Indikator Kinerja Outcomes	95,43 %
2.	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	Indikator Kinerja Outcomes	89,78 %
3.	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	Indikator Kinerja Outcomes	83,93 %
4.	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	Indikator Kinerja Outcomes	84,83 %

c. Bidang Pengawasan dan Pembinaan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET 2026
1.	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	Indikator Kinerja Outcomes	Level 3
2.	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	Indikator Kinerja Outcomes	92,91 %
3.	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	Indikator Kinerja Outcomes	16,85 %
4.	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan dalam Pelaksanaan Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	Indikator Kinerja Outcomes	12,74 %

d. Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET 2026
1.	Meningkatnya Penggalan Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	82,19 %
2.	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	83,81 %
3.	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama	Indikator Kinerja Outcomes	93,62 %
4.	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	Indikator Kinerja Outcomes	100 %

--	--	--	--	--

e. Sekretariat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		JENIS INDIKATOR	TARGET 2026
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	Indikator Kinerja Outcomes	94,96 %
		1.2	Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	Indikator Kinerja Outcomes	4,92 %
		1.3	Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	80,92 %

f. UPTB Pusat Informasi dan Aplikasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		JENIS INDIKATOR	TARGET 2026
1.	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Indikator Kinerja Outcomes	62,67 %
2.	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	Persentase Meningkatnya Kerjasama	Meningkatnya Kerjasama	Indikator Kinerja Outcomes	91,54 %
3.	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	Indikator Kinerja Outcomes	79,21 %
4.	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Indikator Kinerja Outcomes	41,78 %
5.	Meningkatnya Kecepatan Internet	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs		Indikator Kinerja Outcomes	100 MBPs

g. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		JENIS INDIKATOR	TARGET 2026
1.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	Indikator Kinerja Outcomes	100 %
2.	Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggakan Pajak	Berkurangnya Tunggakan Pajak	Indikator Kinerja Outcomes	8,62 %
3.	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	9,60 %

B. Evaluasi Kinerja Tahun Lalu

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2025			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	1,95	2,052	105,238	500.000.000	454.936.040	90,98	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> - Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; - Upaya <i>cross-cutting</i> bersama stakeholder Kepolisian dan Jasaraharja dalam penerimaan pajak PKB dan BBN-KB sudah optimal dengan penggunaan anggaran yang efisien - Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja <u>Faktor Pendukung:</u> - Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan (OPAD) telah memberikan kontribusi nyata dalam mencapai kinerja pencapaian penerimaan PAD diatas 90%, e kinerja pegawai dengan SKP memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja - Pelaksanaan door to door service cukup efektif sebagai aktivitas nyata dalam rencana aksi AKIP - Kolaboratif baik internal dan eksternal bagi upaya peningkatan kinerja organisasi - Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah seperti, pembayaran secara non tunai menggunakan mesin EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal - Kolaboratif baik internal dan eksternal bagi upaya peningkatan kinerja organisasi - Sosialisasi secara massif terhadap pembayaran pajak daerah cukup signifikan - Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang berlangsung pada tanggal 16 Agustus 2025 s.d 17 Desember 2025 - Sinergi dan kolaborasi pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

2.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>Revenue Mobilization</i>)	5,00	10,0491	200,982	312.400.000	284.937.838	91,21	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Upaya <i>cross-cutting</i> bersama stakeholder Kepolisian dan Jasaraharja dalam penerimaan pajak PKB dan BBN-KB sudah optimal dengan penggunaan anggaran yang efisien 3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja <u>Faktor Pendukung:</u> 1. Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan (OPAD) telah memberikan kontribusi nyata dalam mencapai kinerja pencapaian penerimaan PAD diatas 90%, e kinerja pegawai dengan SKP memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja 2. Terus melakukan rapat koordinasi dengan OPD pemungut retribusi dan BUMD/BUMS yang menerima penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara rutin 3. Pelaksanaan operasi gabungan dengan pihak Kepolisian, Dishub dan Sat Pol PP berjalan cukup efektif 4. Koordinasi dan konsultasi secara intensif dengan Kementerian ESDM terkait dengan dana bagi hasil Migas 5. Memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dari sisi pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah 6. Sinergi dan kolaborasi pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
3.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0,434	0,4458	102,72	980.400.000	814.937.400	83,12	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Tagging pendanaan pembangunan melalui PAD pada APBD telah tepat sasaran <u>Faktor Pendukung:</u> 1. Memberikan program penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan bunga Pajak

									Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2. Pembentukan Satgas PBB-KB pada perairan/laut di Provinsi Sumatera Selatan 3. Integrasi data wajib pajak pusat dengan data wajib pajak daerah pada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan 4. Perpanjangan kerjasama dengan BP Batam dalam rangka back up database server utama yang ada main/recovery data 5. Pembangunan dan pengembangan aplikasi samsat bapenda, perbaikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terkait pengolahan, pengamanan dan up grading data serta peralatan pengolahan data yang lebih canggih dan modern 6. Pengawasan pajak daerah secara intensif berbasis risiko untuk kendali kecurangan terhadap kebocoran penerimaan pajak daerah 7. Meningkatkan intensifikasi, memperluas ekstensifikasi serta diversifikasi pajak daerah 8. Memperluas akses keuangan pembayaran pajak daerah melalui plaform digitalisasi untuk inklusi keuangan yang lebih baik
4.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD	1,26	(17,835)	(14,15)	535.000.000	456.199.100	85,27	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 4. Perubahan rencana kerja memastikan ketercapaian kinerja dengan dukungan anggaran <u>Faktor Penghambat:</u> 1. Perubahan paradigma kebijakan UU 28/2009 ke UU 1/2022, dimana pada tahun 2025, awal pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB 2. Pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2025 mengamatkan bahwa Opsen PKB dan Opsen BBN-KB split payment secara real time ke RKUD Kabupaten/Kota

									3. Secara pencatatan akuntansi realisasi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB langsung dicatat ke RKUD Kabupaten/Kota 4. Belum optimalnya upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Sumatera Selatan 5. Kondisi perekonomian di Sumatera Selatan dan di seluruh provinsi di Pulau Sumatera mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi 6. Konsolidasi fiskal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah mengalami penyesuaian sehingga mempengaruhi nilai transfer ke daerah
5.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1,25	0,821	65,68	756.287.000	668.506.000	88,39	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) <u>Faktor Penghambat:</u> 1. Belum optimalnya pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB Bersama Pemerintahan Kabupaten/Kota 2. Kebijakan equivalen pembayaran pajak daerah PKB dan BBN-KB berdampak pada penurunan penerimaan pendapatan di sektor pajak daerah 3. Perlambatan struktur perekonomian daerah yang mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi rendah 4. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah masih rendah terutama pajak PKB 5. Kendaraan yang beroperasi dalam menjalankan usahanya di Sumatera Selatan banyak yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Selatan 6. Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengawasan pajak daerah 7. Belum optimalnya update data kendaraan bermotor 8. Layanan pembayaran pajak daerah belum seluruhnya menyentuh titik layanan sampai ke tingkat pedesaan

6.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	48,45	44,53	91,91	1.140.000.000	1.098.450.000	96,35	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Program keringan pajak daerah dan insentif pajak daerah menstimulus PAD 3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja <u>Faktor Pendukung:</u> 1. Sinergi dan kolaborasi antar stakeholder dalam menggali potensi Retribusi Daerah 2. Kerjasama kolaboratif bersama Agen Pemegang Merk Tunggal (ATPM) kendaraan bermotor 3. Kerjasama dengan Camat, Lurah dan Ketua RT setempat dalam rangka penagihan pajak daerah 4. Kerjasama dengan Dirlantas melalui kegiatan razia kendaraan bermotor 5. Program kredit murah bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah dalam keringanan berusaha 6. Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan titik pelayanan baru seperti samsat desa dan samsat drive thru 7. Mengendalikan tindak pengendalian atas perhitungan beban tariff pajak, denda pajak dan bunga pajak 8. Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor telah di update dalam system informasi pembayaran pajak daerah 9. Secara berkala melaksanakan rapat koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Sumatera Selatan untuk membahas kendala dan permasalahan yang timbul di lapangan
----	--	---	-------	-------	-------	---------------	---------------	-------	---

7.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	92,03	82,91	90,08	634.000.000	550.200.000	86,78	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Upaya <i>cross-cutting</i> bersama stakeholder Kepolisian dan Jasaraharja dalam penerimaan pajak PKB dan BBN-KB sudah optimal dengan penggunaan anggaran yang efisien 3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja <u>Faktor Pendukung:</u> 1. Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan (OPAD) telah memberikan kontribusi nyata dalam mencapai kinerja pencapaian penerimaan PAD diatas 90%, e kinerja pegawai dengan SKP memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja 2. Pelaksanaan door to door service cukup efektif sebagai aktivitas nyata dalam rencana aksi AKIP 3. Kolaboratif baik internal dan eksternal bagi upaya peningkatan kinerja organisasi 4. Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah seperti, pembayaran secara non tunai menggunakan mesin EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal 5. Pelaksanaan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) secara gabungan dengan stakeholder terkait dan secara berkala waktu 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah
8.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,96	0,82	85,41	300.000.000	257.345.430	85,78	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat secara intensif (kolaboratif) memberikan pengaruh terhadap penyaluran dana transfer pusat bisa terealisasi 3. Penyaluran dana bagi hasil pemerintah pusat dengan system <i>treasury deposit facility</i> cukup efisien

									<u>Faktor Penghambat:</u> 1. Perlambatan perekonomian Sumatera Selatan yang menyebabkan PDRB riil per kapita mengalami perlambatan yang mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru 2. Belum optimalnya penagihan pajak daerah sampai ke titik pelayanan wilayah pedesaan 3. Perlambatan daya serap anggaran sinergi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota 4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di sektor pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah belum berjalan secara optimal 5. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak daerah belum optimal 6. Belum optimalnya penggalan sumber potensi yang menjadi penerimaan Retribusi Daerah 7. Pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB memerlukan kebijakan equivalen dengan pembayaran pajak sesuai UU 28/2009 8. Belum optimalnya sinergi Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPAD) perairan dan daratan
9.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	1,12	2,53	225,89	500.000.000	414.311.000	82,86	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Program keringan pajak daerah dan insentif pajak daerah menstimulus PAD 3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 4. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) <u>Faktor Pendukung:</u> 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui pendidikan formal dan informal secara bertahap 2. Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor telah di update dalam system informasi pembayaran pajak daerah 3. Mengendalikan tindak pengendalian atas

									perhitungan beban tariff pajak, denda pajak dan bunga pajak 4. Kolaboratif bersama dengan pihak Kepolisian dalam penertiban kendaraan bermotor 5. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah 6. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing- masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing-masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Capaian kinerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

1. Kinerja unit eselon III (IKSSO Level 1) memberikan kontribusi terhadap kinerja unit eselon II (IKSS) sebesar (%) :

	Δ (lnIKSS1)	Δ (lnIKSS2)	Δ (lnIKSS3)	Δ (lnIKSS4)	Δ (lnIKSS5)	Δ (lnIKSS6)
Δ (lnIKSS01)	84.17	89.33	81.01	88.76	80.52	86.42
Δ (lnIKSS02)	89.37	87.48	83.51	86.18	83.15	82.26
Δ (lnIKSS03)	87.45	82.53	80.14	86.24	89.83	84.63
Δ (lnIKSS04)	87.46	88.22	81.27	82.16	81.64	83.16
Δ (lnIKSS05)	86.19	81.08	84.26	88.28	83.58	84.35
Δ (lnIKSS06)	82.45	83.19	88.65	81.12	89.76	82.36
Δ (lnIKSS07)	86.00	82.82	88.62	85.18	82.45	89.41

2. Kinerja unit eselon IV (IKSSO Level 2) memberikan kontribusi terhadap kinerja unit eselon III (IKSSO Level 1) sebesar (%) :

	Δ (lnIKSS01)	Δ (lnIKSS02)	Δ (lnIKSS03)	Δ (lnIKSS04)	Δ (lnIKSS05)	Δ (lnIKSS06)	Δ (lnIKSS07)
Δ (lnIKSS08)	86.69	85.71	83.73	87.12	88.58	85.33	81.05
Δ (lnIKSS09)	81.32	87.74	89.10	84.28	84.25	84.51	82.65
Δ (lnIKSS010)	87.37	84.64	86.10	86.63	85.71	83.62	89.34
Δ (lnIKSS011)	82.13	85.20	80.24	87.18	84.15	86.26	83.34
Δ (lnIKSS012)	86.18	85.18	87.13	84.15	82.31	88.21	84.81
Δ (lnIKSS013)	85.73	88.92	86.84	85.75	86.72	89.60	86.51
Δ (lnIKSS014)	85.61	82.82	88.28	87.46	87.71	83.32	84.45
Δ (lnIKSS015)	88.36	84.36	81.83	82.63	87.21	86.65	87.38
Δ (lnIKSS016)	83.34	82.27	82.24	87.20	87.67	84.38	81.34
Δ (lnIKSS017)	80.17	83.66	86.71	81.32	80.63	89.63	84.48
Δ (lnIKSS018)	82.41	81.52	85.18	88.32	80.11	83.13	85.54
Δ (lnIKSS019)	89.52	88.43	86.19	82.32	87.77	85.51	86.69
Δ (lnIKSS020)	88.65	88.12	85.23	81.42	81.52	88.53	87.72
Δ (lnIKSS021)	84.82	82.32	89.14	83.61	88.76	81.25	85.23

$\Delta (lnIKSS022)$	86.16	89.26	80.41	87.65	85.31	86.92	87.72
$\Delta (lnIKSS023)$	87.23	82.00	82.13	84.48	85.16	83.26	84.23
$\Delta (lnIKSS024)$	84.62	81.63	84.62	85.56	84.41	84.19	89.65
$\Delta (lnIKSS025)$	84.16	87.16	85.67	85.62	83.36	84.77	88.78
$\Delta (lnIKSS026)$	88.28	86.57	84.47	87.32	81.73	85.95	81.29
$\Delta (lnIKSS027)$	81.29	84.14	85.56	86.68	84.49	89.64	82.66

3. Persentase *Cross Cutting*

(1) IKSSO Level 1 Terhadap IKSS

	$\Delta (lnIKSS1)$	$\Delta (lnIKSS2)$	$\Delta (lnIKSS3)$	$\Delta (lnIKSS4)$	$\Delta (lnIKSS5)$	$\Delta (lnIKSS6)$
$\Delta (lnIKSS01)$	11.63	19.27	21.73	12.44	18.25	18.27
$\Delta (lnIKSS02)$	14.28	14.17	16.37	14.74	13.25	15.43
$\Delta (lnIKSS03)$	16.18	16.18	13.34	14.74	17.27	16.82
$\Delta (lnIKSS04)$	13.24	12.27	14.21	14.13	15.14	14.16
$\Delta (lnIKSS05)$	15.62	14.29	17.16	17.32	15.12	13.14
$\Delta (lnIKSS06)$	13.26	14.38	14.72	13.42	12.38	16.51
$\Delta (lnIKSS07)$	12.32	13.18	15.62	14.41	18.25	16.38

(2) IKSSO Level 2 Terhadap IKSSO Level 1

	$\Delta (lnIKSS01)$	$\Delta (lnIKSS02)$	$\Delta (lnIKSS03)$	$\Delta (lnIKSS04)$	$\Delta (lnIKSS05)$	$\Delta (lnIKSS06)$	$\Delta (lnIKSS07)$
$\Delta (lnIKSS08)$	13.71	10.18	12.15	12.52	11.26	17.18	18.35
$\Delta (lnIKSS09)$	18.26	12.13	13.24	15.87	12.62	13.48	17.81
$\Delta (lnIKSS010)$	12.34	11.72	12.42	13.24	10.32	15.26	19.16
$\Delta (lnIKSS011)$	13.24	14.71	12.32	13.29	16.38	15.16	12.31
$\Delta (lnIKSS012)$	14.26	14.26	12.18	12.62	18.45	17.40	16.40
$\Delta (lnIKSS013)$	14.51	15.42	16.14	14.12	12.47	16.13	15.23
$\Delta (lnIKSS014)$	14.14	17.28	16.14	10.14	12.62	14.66	15.42
$\Delta (lnIKSS015)$	19.24	15.54	13.72	11.38	12.61	13.25	12.62
$\Delta (lnIKSS016)$	16.17	13.15	17.67	12.21	17.23	14.32	18.26
$\Delta (lnIKSS017)$	10.87	16.64	15.25	14.24	12.23	19.23	14.51

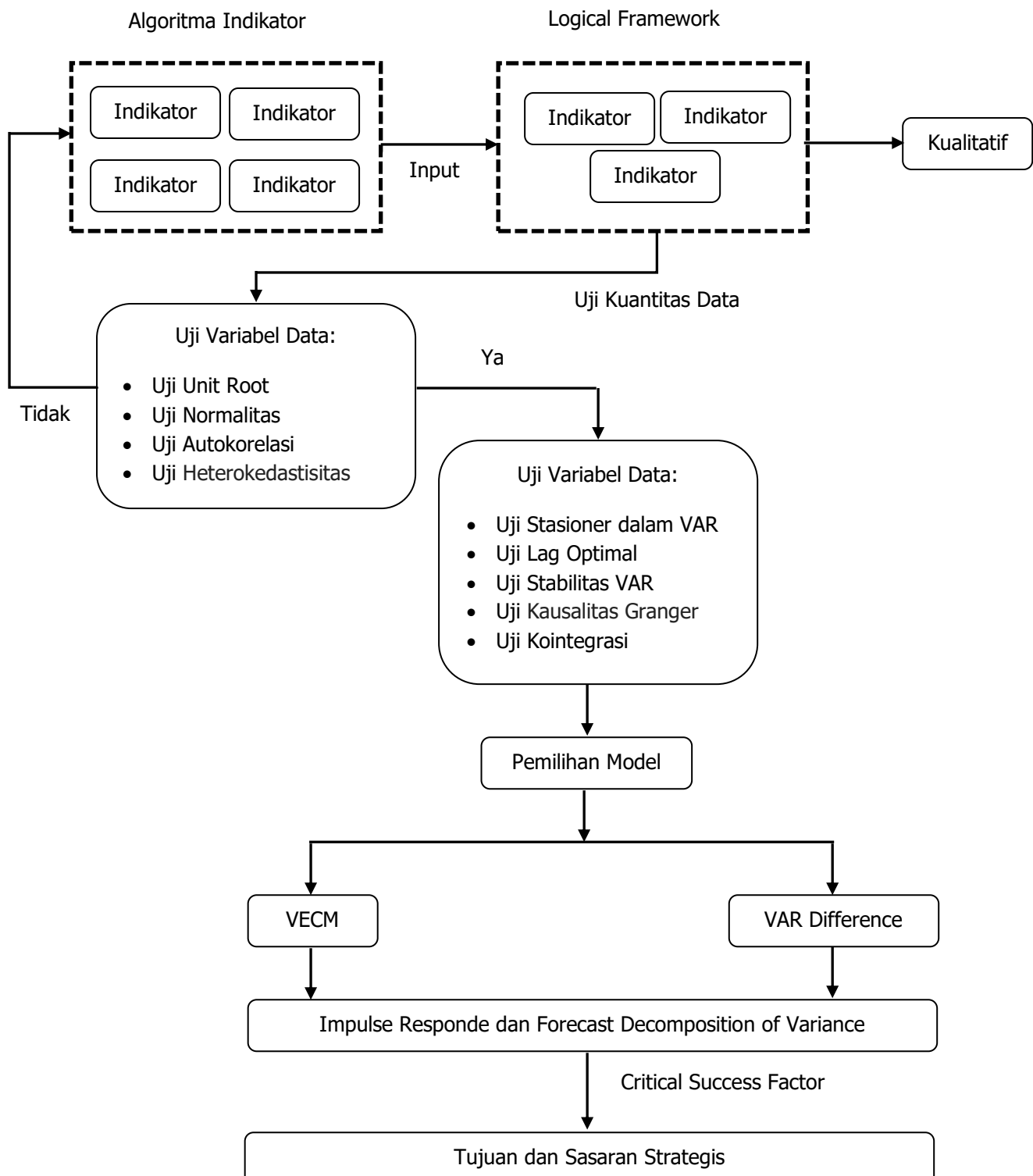
$\Delta (lnIKSSO18)$	10.52	11.43	14.65	12.74	14.32	12.45	13.15
$\Delta (lnIKSSO19)$	11.24	12.87	13.32	16.61	13.28	16.82	15.65
$\Delta (lnIKSSO20)$	12.65	11.28	14.64	18.54	18.58	11.41	10.27
$\Delta (lnIKSSO21)$	15.18	16.94	10.82	16.14	11.28	18.45	14.74
$\Delta (lnIKSSO22)$	13.35	19.67	11.35	12.42	14.65	11.01	18.62
$\Delta (lnIKSSO23)$	12.17	12.16	12.23	18.26	14.53	16.74	15.80
$\Delta (lnIKSSO24)$	14.65	13.37	15.36	16.15	16.65	14.21	10.34
$\Delta (lnIKSSO25)$	15.15	14.45	14.20	16.24	12.21	15.28	11.22
$\Delta (lnIKSSO26)$	11.78	11.42	17.24	11.18	13.59	12.72	18.61
$\Delta (lnIKSSO27)$	18.72	16.64	16.62	13.13	14.55	16.33	17.41

4. Nilai kinerja Perangkat Daerah atas Aspek Implementasi diperoleh nilai sebesar (NKI = 63,39 %) dengan kategori tinggi.
5. Nilai kinerja Perangkat Daerah atas Aspek Manfaat (Capaian Sasaran Strategis (CSS = 94,00 %, dengan kategori sangat tinggi)) sementara (Capaian Sasaran Program (CSP = 69,00 %, dengan kategori tinggi));
6. Nilai kinerja anggaran tingkat Perangkat Daerah atas Aspek Manfaat (NKK = 81,05 %, dengan kategori baik) sementara nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan program bernilai 67,13 % dengan kategori tinggi.

C. Pengukuran Kinerja

Metodologi yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi kinerja, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menggunakan alat dan teknik analisis dengan software eviews versi 13 dan Sistem Informasi Kendali Kinerja (SI KEN-KIN) dengan metodologi sebagai berikut :

1. Melakukan analisis data indikator dengan melakukan pembuktian secara kuantitatif



Pada tahapan ini, semua indikator yang telah disusun berdasarkan penjenjangan atau cascading, mulai dari Indikator Tujuan, Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO) Level 1, IKSSO Level 2 dan seterusnya sampai dengan indikator kinerja output sub kegiatan.

2. Membuat Indikator Index Level Data

INDEX	INDIKATOR	LEVEL	PEMILIK
IKSS1	Persentase Pencapaian Penerimaan PAD	Sasaran Strategis 1	Kepala Daerah Badan Pendapatan
IKSS2	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Non DAU dan DAK	Sasaran Strategis 2	Kepala Daerah Badan Pendapatan
IKSS3	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi (Nilai absolut)	Sasaran Strategis 3	Kepala Daerah Badan Pendapatan
IKSS4	Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	Sasaran Strategis 4	Kepala Daerah Badan Pendapatan
IKSS5	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	Sasaran Strategis 5	Kepala Daerah Badan Pendapatan
IKSS6	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Sasaran Strategis 6	Kepala Daerah Badan Pendapatan
IKSSO1	Persentase Realisasi Penerimaan Target Terhadap GDP	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala Bidang Pajak
IKSSO2	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala Bidang PDLL
IKSSO3	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan
IKSSO4	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala Bidang P2PATDA
IKSSO5	Persentase Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Sekretaris Badan
IKSSO6	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala UPTB Puslia
IKSSO7	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala UPTB PPD
IKSSO8	Persentase Meningkatnya Subjek Pajak	Sasaran Strategis	Kepala Subbid Pajak

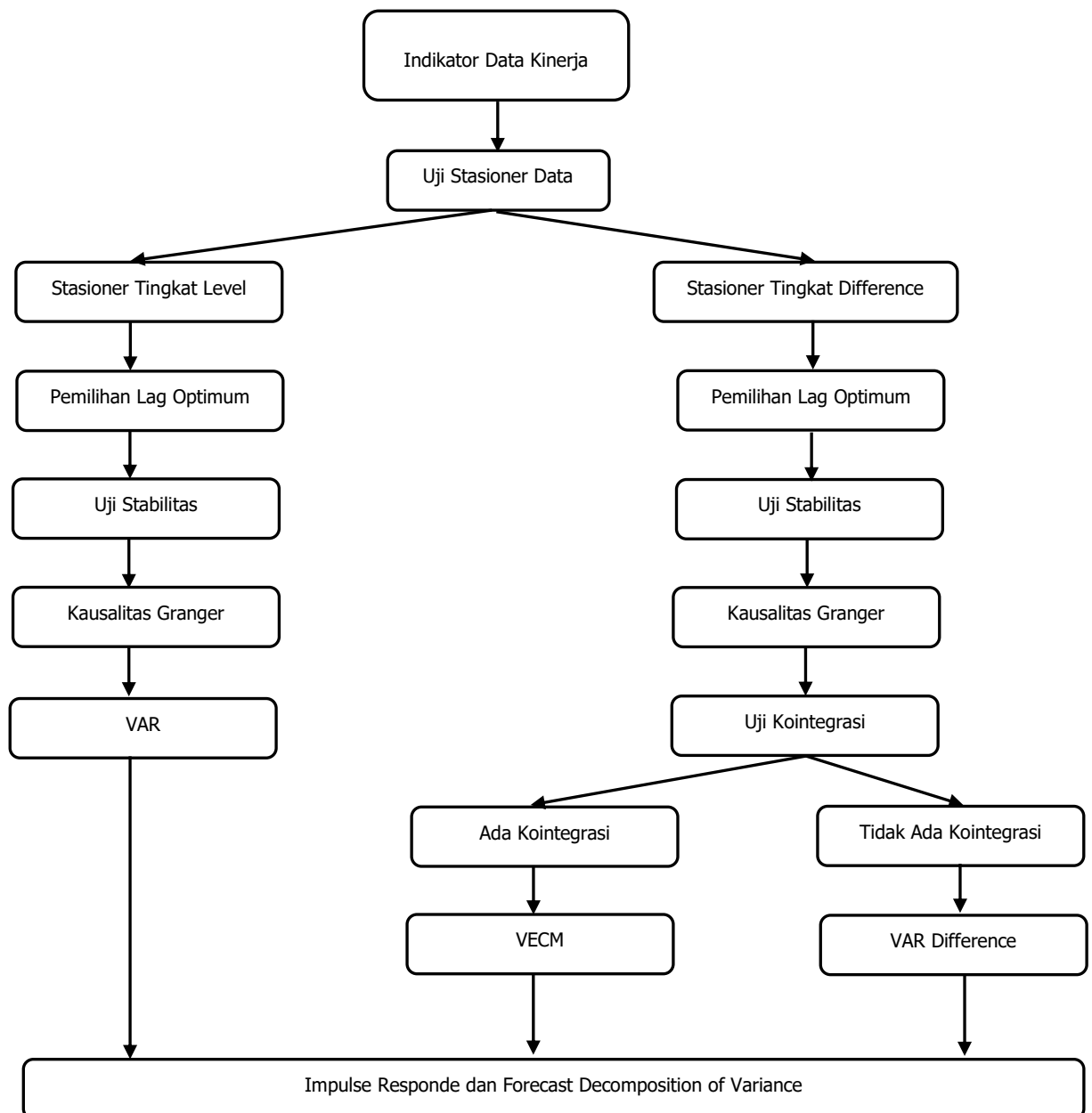
	Daerah			Outcomes Level 2		
IKSSO9	Persentase doleansi pajak	berkurangnya pengajuan		Sasaran Outcomes Level 2	Strategis	Kepala Subbid Doleansi
IKSSO10	Persentase ikhtisar pembukuan pajak	meningkatnya ketelitian		Sasaran Outcomes Level 2	Strategis	Kepala Subbid Pembukuan
IKSSO11	Persentase Pendapatan Retribusi	Meningkatnya Terhadap Target	Realisasi	Sasaran Outcomes Level 2	Strategis	Kepala Subbid Retribusi
IKSSO12	Persentase Bagi Hasil	Meningkatnya	Penerimaan	Sasaran Outcomes Level 2	Strategis	Kepala Subbid Penerimaan Pusat
IKSSO13	Persentase Hibah	Meningkatnya	Penerimaan	Sasaran Outcomes Level 2	Strategis	Kepala Subbid Hibah
IKSSO14	Persentase Pemeriksaan	Meningkatnya	Intensitas	Sasaran Outcomes Level 2	Strategis	Kepala Subbid Wilayah I
IKSSO15	Persentase Penyelesaian	Berkurangnya Tindak Lanjut		Sasaran Outcomes Level 2	Strategis	Kepala Subbid Wilayah II
IKSSO16	Persentase Refresif	Berkurangnya Tindakan		Sasaran Outcomes Level 2	Strategis	Kepala Subbid Wilayah III
IKSSO17	Persentase Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Penelitian		Sasaran Outcomes Level 2	Strategis	Kepala Subbid Statistik
IKSSO18	Persentase Meningkatkan Kerjasama			Sasaran Outcomes Level 2	Strategis	Kepala Subbid Pengolahan Pendapatan
IKSSO19	Persentase Meningkatkan Peraturan yang Diharmonisasi			Sasaran Outcomes Level 2	Strategis	Kepala Subbid Hukum
IKSSO20	Persentase Meningkatkan Pertanggungjawaban Keuangan	Akuntabilitas		Sasaran Outcomes Level 2	Strategis	Kepala Subbag Keuangan
IKSSO21	Persentase Penggunaan Anggaran	Efisiensi dan Efektifitas		Sasaran Outcomes Level 2	Strategis	Kepala Subbag Perencanaan
IKSSO22	Persentase Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Kompetensi		Sasaran Outcomes Level 2	Strategis	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
IKSSO23	Persentase Meningkatkan Kerjasama			Sasaran Outcomes Level 2	Strategis	Kepala Subbag TU UPTB Puslia
IKSSO24	Persentase Digitalisasi	Meningkatnya Penggunaan		Sasaran Outcomes Level 2	Strategis	Kepala Seksi Jaringan UPTB Puslia
IKSSO25	Persentase Keamanan Data Informasi	Meningkatnya Sistem		Sasaran Outcomes Level 2	Strategis	Kepala Seksi Keamanan Data dan Informasi UPTB Puslia
IKSSO26	Persentase Pajak	Berkurangnya Tunggakan		Sasaran Outcomes Level 2	Strategis	Kepala Seksi Penagihan UPTB PPD
IKSSO27	Persentase Perhitungan Penetapan Pajak Daerah	Berkurangnya Perhitungan Kesalahan Dalam		Sasaran Outcomes Level 2	Strategis	Kepala Seksi Penetapan UPTB PPD

3. Persamaan Data

Untuk melakukan running data, persamaan data pada masing indikator index yang telah ditetapkan harus dilakukan standarisasi dengan computasi data ke logaritma natural (ln) sehingga data mempunyai level pembacaan yang sama pada software evIEWS versi 13.

4. Tahapan Pemilihan Model

Pemilihan model yang cocok pada kinerja Badan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggunakan metodologi tahapan sebagai berikut :



Metodologi yang digunakan dalam menguji kuantitatif indikator kinerja ini bertujuan untuk melihat hubungan kausalitas (sebab-akibat) dan/atau (jika-maka) antar indikator dalam mendukung tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Teknik analisis yang digunakan dengan *vector error*

correction model (VECM) yaitu pengembangan dari vector autoregression model dimana terdapat kointegrasi antar variable.

- a. Uji Stasioneritas dalam VAR menggunakan uji akar – akar (unit root test) dengan metode Augmented Dickey Fuller Test (ADF Test). Jika nilai probabilitas < 0,05 maka data tidak mengandung akar unit yang artinya data stasioner.
- b. Uji lag optimal dilihat dari nilai Akaike Information Criteria (AIC) yang paling minimum
- c. Uji stabilitas VAR, stabilitas VAR perlu diuji dahulu sebelum melakukan analisis yang lebih jauh. Model VAR dinyatakan stabil jika rootnya memiliki nilai modulus kurang dari 1 (satu).
- d. Uji kausalitas granger dilakukan untuk mengetahui apakah suatu variable endogen dapat diperlakukan sebagai variable eksogen. Hal ini bermula dari ketidaktahuan keterpengaruhannya antar variable. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka ada hubungan kausalitas.
- e. Uji kointegrasi untuk mengetahui apakah akan terjadi keseimbangan dalam jangka panjang yaitu terdapat kesamaan pergerakan dan stabilitas hubungan diantara variable-variabel di dalam metodologi ini atau tidak. Uji kointegrasi dilakukan dengan menggunakan metode Johansen's Cointegration Test. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05 berarti terdapat persamaan kointegrasi yang berarti memiliki keseimbangan jangka panjang.

Model analisis yang digunakan dalam metodologi ini dengan pendekatan hubungan variabel dinamis dengan model faktor koreksi kesalahan (VECM) model, uji stasioner, kausalitas Granger dan kointegrasi yang terdiri dari (1) model pertama akan menjelaskan bagaimana hubungan antara Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes Level 1; (2) model kedua akan menjelaskan bagaimana hubungan antara Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes Level 1 dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes Level 2; (3) model ketiga akan menjelaskan bagaimana hubungan antara Indikator Kinerja Sasaran Strategis Level 1 dan Level 2 secara bersama-sama mempengaruhi Indikator Kinerja Sasaran Strategis.

Uji akar unit pada metodologi ini menggunakan rumusan yang dikembangkan oleh Levin dkk (2002) dan Im dkk (2005). Persamaan uji akar unit Levin dkk (2002) dan Im dkk dengan mempertimbangkan kriteria Augmented Dickey Fuller (ADF test) sebagai berikut :

$$\Delta \ln Y_t = \rho_t Y_{t-1} + \sum_{j=1}^{\rho_t} \delta_{t,j} \Delta \ln Y_{t-j} + \varepsilon_t \quad (1)$$

Dimana : Y merupakan vektor dari variabel endogen utama dalam metodologi ini yaitu tujuan Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO) Level 1 dan IKSSO Level 2. Uji unit akar oleh Levin dkk. (2002) dengan asumsi bahwa akurasi parameter p , identik dalam deret waktu (yaitu, p , p untuk semua t), sedangkan urutan lag p , dapat bervariasi secara bebas. Prosedur ini menguji hipotesis nol $p = 0$ untuk semua t terhadap hipotesis alternatif $p < 0$ untuk semua t . Penolakan hipotesis nol menunjukkan kemungkinan dilanjutkannya proses integrasi data dan sebaliknya.

Uji unit akar oleh Im et al. (2005) yang juga berdasarkan persamaan (1), berbeda dengan uji unit akar Levin dkk. (2002), dengan asumsi π menjadi heterogen antar bagian. Uji unit akar oleh Im et al. (2005) pengujian hipotesis nol diterima jika $p_t = 0$ terhadap hipotesis alternatif $p < 0$, ($t=1, \dots, t$); $p = 0$, ($t=t, \dots, t$) untuk semua t . Penerimaan hipotesis alternatif memungkinkan rangkaian individu untuk diintegrasikan. Uji unit root oleh Levin dkk. (2002) dan Im dkk. (2005) dapat diestimasi pada data pada level dan first differential dalam bentuk logaritma natural ($\ln$).

Secara empiris metodologi ini untuk melihat dampak secara kausalitas terhadap Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO) Level 1 dan IKSSO Level 2 terhadap tujuan Perangkat Daerah dalam jangka pendek dan panjang, metodologi ini juga menggunakan uji kointegrasi, untuk melihat kemungkinan maksimal uji kointegrasi Johansen (Verbeek, 2012) untuk mengetahui hubungan jangka pendek dan panjang antar variabel-variabel data yang diteliti. Dalam pengecekan Granger analisis kausalitas juga perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang baik dari hasil pengujian dengan memilih panjang lag optimal yang tepat. Kerangka kointegrasi Johansen mengambil titik awalnya pada model koreksi kesalahan vektor (VECM), sedangkan persamaannya dapat ditampilkan sebagai berikut :

$$x_t = A_1 x_{t-1} + \dots + A_p x_{t-p} + B y_t + \varepsilon_t \quad (2)$$

Dimana: x_t , adalah vektor variabel data endogen, dan A mewakili matriks autoregresif. y_t , adalah vektor deterministik dan B mewakili matriks parameter. E adalah vektor inovasi dan p adalah panjang lag.

Untuk mengungkap arah kausalitas antara Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO) Level 1 dan IKSSO Level 2 terhadap tujuan Perangkat Daerah dalam konteks variabel data. Maka model persamaan kausalitas VECM Granger dapat dilihat sebagai berikut :

$$\Delta \ln IKSS1_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSS1_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSS1_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSS01_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSS01_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSS02_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSS02_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSS03_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSS03_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSS04} \pi_{6t,l} \Delta \ln IKSS04 + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (3)$$

$$\Delta \ln IKSS01_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSS01_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSS01_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSS08_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSS08_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSS09_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSS09_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSS010_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSS010_{t-1} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (4)$$

$$\begin{aligned} \Delta \ln IKSS02_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSS02_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSS02_{t-1} \\ + \sum_{l=1}^{mIKSS011_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSS011_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSS012_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSS012_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSS013_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSS013_{t-1} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \end{aligned} \quad (5)$$

$$\begin{aligned} \Delta \ln IKSS03_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSS03_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSS03_{t-1} \\ + \sum_{l=1}^{mIKSS014_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSS014_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSS015_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSS015_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSS016_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSS016_{t-1} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \end{aligned} \quad (6)$$

$$\begin{aligned} \Delta \ln IKSS04_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSS04_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSS04_{t-1} \\ + \sum_{l=1}^{mIKSS017_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSS017_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSS019_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSS019_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSS020_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSS020_{t-1} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \end{aligned} \quad (7)$$

$$\begin{aligned} \Delta \ln IKSS05_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSS05_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSS05_{t-1} \\ + \sum_{l=1}^{mIKSS020_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSS020_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSS021_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSS021_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSS022_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSS022_{t-1} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \end{aligned} \quad (8)$$

$$\begin{aligned} \Delta \ln IKSS06_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSS06_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSS06_{t-1} \\ + \sum_{l=1}^{mIKSS023_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSS023_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSS024_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSS024_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSS025_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSS025_{t-1} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \end{aligned} \quad (9)$$

$$\begin{aligned} \Delta \ln IKSS07_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSS07_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSS07_{t-1} \\ + \sum_{l=1}^{mIKSS026_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSS026_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSS027_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSS027_{t-1} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \end{aligned} \quad (10)$$

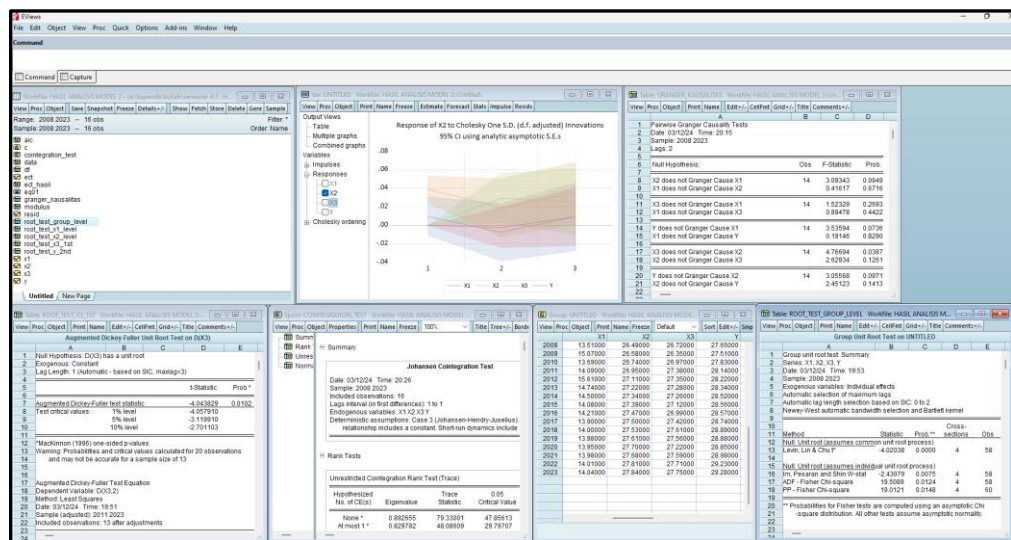
Dimana t adalah periode waktu (t = 1,..., t); l lag dari setiap variabel data; lnIKSS adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis; lnIKSSO adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes Level 1 dan IKSSO Level 2; EC adalah koreksi kesalahan dan $\varepsilon_1 \varepsilon_2 \varepsilon_3$ mengasumsikan tingkat kesalahan pada model (istilah kesalahan).

Menurut Lopez & Weber (2017) akan diperoleh beberapa kemungkinan mengenai nilai koefisien masing-masing variabel data tersebut, yaitu (i) misalnya pada persamaan pertama hanya terjadi kausalitas antara IKSS dan

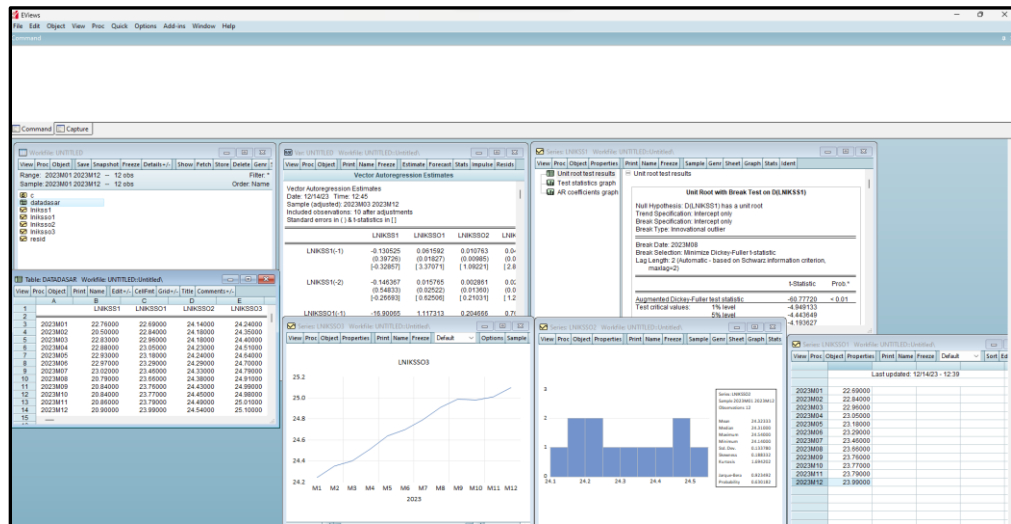
IKSSO Level 1 dan IKSSO Level 2 terhadap tujuan Perangkat Daerah, artinya hanya $Y_t = 0$ (penolakan hipotesis nol), sedangkan semua hipotesis β_{1t} dan $\theta_{1t} = 0$ berarti antara IKSS, IKSSO Level 1 dan IKSSO Level 2 dan Y_t tidak ada hubungan sebab akibat satu sama lain (penerimaan hipotesis nol), hal ini menunjukkan paling sedikit ada satu hubungan atau yang lainnya; (ii) penerimaan hipotesis nol terjadi, jika semua probabilitas berada pada $\gamma_{1t}\beta_{1t}\delta_{1t} = 0$, yang berarti tidak ada satu pun variabel yang memiliki hubungan sebab akibat yang baik dalam arah yang sama (berarah) atau dua arah (dua arah); (iii) penolakan hipotesis nol terjadi, jika terdapat kemungkinan lain, misalnya jika $\gamma_{1t}\beta_{1t}\delta_{1t} \neq 0$, yang berarti semua variabel mempunyai kemungkinan adanya hubungan sebab akibat dan/atau jika maka baik searah (direksional) maupun dua arah (dua arah).

5. Running Data

Untuk melakukan pengujian terhadap variabel data kinerja yang telah disusun, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan software eviews versi 13 sebagai berikut :



Gambar 1 Tampilan Awal eviews versi 13



Gambar 2 Tampilan Running Data

A. Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi:

1. Pengukuran Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

a. Capaian Keluaran

- 1) Pengukuran Capaian Keluaran (Output) Program dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik (Π) berdasarkan rata-rata ukur secara geometrik (Π) perbandingan antara realisasi indikator dan target indikator. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$CKP = \prod_{i=1}^m \left(\left(\prod_{n=1}^n \frac{\text{Realisasi Indikator } i}{\text{Target Indikator } i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \times 100 \%$$

Keterangan :

CKP : Capaian Keluaran (*Output*) Program

m : Jumlah Keluaran (*Output*) Program

n : Jumlah Indikator Keluaran (*Output*) Program

Capaian Keluaran (Output) Program (CKP)	Indikator Keluaran (Output) Program (IKP)		
	IKP	Target (TIKP)	Realisasi (RIKP)
CKP 1	IKP 1	93,48	90,44

CKP 2	IKP 2	97,03	95,15
CKP 3	IKP 3	88,12	67,16

$$CKP = \left(\left(\left(\frac{90,44}{93,48} \right) \times \left(\frac{95,15}{97,03} \right) \times \left(\frac{67,16}{88,12} \right) \right)^{\frac{1}{3}} \right) \times 100 \%$$

$$CKP = \left((0,96 \times 0,98 \times 0,76)^{\frac{1}{3}} \right) \times 100 \%$$

$$CKP = 89,00 \%$$

- 2) Pengukuran Capaian Keluaran (*Output*) Kegiatan dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometric (Π) dari perkalian antara perbandingan realisasi dan target volume keluaran dengan rata-rata ukur secara geometric (Π) perbandingan antara capaian dan target indikator. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$CKK = \prod_{i=1}^m \left(\left(\frac{RVK \text{ ke } i}{TVK \text{ ke } i} \times \left(\prod_{j=1}^n \frac{\text{Realisasi Indikator } i}{\text{Target Indikator } i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right)$$

Keterangan :

CKK : Capaian Keluaran (*Output*) Kegiatan

RVK : Realisasi Volume Keluaran (*Output*) Kegiatan

TVK : Target Volume Keluaran (*Output*) Kegiatan

m : Jumlah Keluaran (*Output*) Kegiatan

n : Jumlah Indikator Keluaran (*Output*) Kegiatan

Capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan (CKK)	Volume		Indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan (IKK)		
	Target (TVK)	Realisasi (RVK)	IKK	Target (TIKK)	Realisasi (RIKK)
Keluaran 1 (SDM)	468	445	IKK ke 1	92,16	82,13
			IKK ke 2	30,00	27,03
Keluaran 2 (Laporan)	64	58	IKK ke 1	3,00	2,00
			IKK ke 2	4,00	2,00
			IKK ke 3	1,00	1,00
			IKK ke 4	1,00	1,00
			IKK ke 5	1,00	1,00
			IKK ke 6	1,00	1,00
			IKK ke 7	1,00	1,00
			IKK ke 8	1,00	1,00
			IKK ke 9	13,00	13,00
			IKK ke 10	3,00	1,00
			IKK ke 11	3,00	3,00
			IKK ke 12	2,00	1,00

			IKK ke 13	29,00	29,00
			IKK ke 14	1,00	1,00
Keluaran 3 (Dokumen)	58	42	IKK ke 1	2,00	1,00
			IKK ke 2	1,00	1,00
			IKK ke 3	1,00	1,00
			IKK ke 4	1,00	1,00
			IKK ke 5	1,00	1,00
			IKK ke 6	1,00	1,00
			IKK ke 7	1,00	1,00
			IKK ke 8	1,00	1,00
			IKK ke 9	2,00	2,00
			IKK ke 10	2,00	2,00
			IKK ke 11	1,00	1,00
			IKK ke 12	12,00	8,00
			IKK ke 13	29,00	18,00
			IKK ke 14	1,00	1,00
			IKK ke 15	2,00	2,00

CKK

$$= \left(\left(\frac{445}{468} \times \left(\frac{82,13}{92,16} \times \frac{27,03}{30} \right)^{\frac{1}{2}} \right) \times \left(\frac{58}{64} \times \left(\frac{2}{3} \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{13}{13} \times \frac{1}{3} \times \frac{3}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{29}{29} \times \frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{14}} \right) \times \left(\frac{42}{58} \times \left(\frac{1}{2} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{2}{2} \times \frac{2}{2} \times \frac{1}{1} \times \frac{8}{12} \times \frac{18}{29} \times \frac{1}{1} \times \frac{2}{2} \right)^{\frac{1}{15}} \right) \times 100 \% \right)$$

$$CKK = 30,00$$

b. Penyerapan Anggaran

Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$P = \frac{RA}{PA} \times 100 \%$$

Keterangan :

- P : Penyerapan Anggaran
- RA : Akumulasi Realisasi Anggaran
- PA : Akumulasi Pagu Anggaran

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		226.466.839.034,00	186.772.021.363,00	82,47
	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	174.300.000,00	98.055.116,00	56,26
	1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58.000.000,00	36.284.836,00	62,56
	1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	59.000.000,00	24.157.7052,00	40,95
	1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.300.000,00	37.612.578,00	65,64
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	168.827.292.000,00	137.776.114.439,00	81,61
	2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	168.426.842.000,00	137.441.519.398,00	81,60
	2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	242.450.000,00	199.340.000,00	82,22
	2.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	158.000.000,00	135.255.041,00	85,60
	3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.600.000,00	5.504.000,00	33,16
	3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.600.000,00	5.504.000,00	33,16
	4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	319.180.000,00	224.233.306,00	70,25
	4.1	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	32.480.000,00	-	0,00
	4.2	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	87.000.000,00	81.996.206,00	94,25
	4.3	Pengolahan Data Retribusi Daerah	157.000.000,00	102.277.100,00	65,14
	4.4	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	42.700.000,00	39.960.000,00	93,58
	5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	936.843.524,00	429.603.060,00	45,86
	5.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	31.200.000,00	-	0,00
	5.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	265.400.000,00	168.630.000,00	63,54
	5.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	279.225.000,00	260.973.060,00	93,46
	5.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	361.018.524,00	-	0,00

		Perundang-Undangan			
	6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.892.747.920,00	19.586.238.672,00	85,56
	6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	833.172.720,00	759.828.800,00	91,20
	6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	699.750.000,00	693.515.514,00	99,11
	6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	500.000.000,00	495.912.000,00	99,18
	6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.809.062.220,00	1.667.268.137,00	92,16
	6.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.419.362.980,00	5.417.617.167,00	99,97
	6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00	45.650.000,00	91,30
	6.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	141.400.000,00	138.455.600,00	97,92
	6.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	601.400.000,00	546.548.924,00	90,88
	6.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12.838.600.000,00	9.821.442.530,00	76,50
	7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.100.000.000,00	998.219.017,00	90,75
	7.1	Pengadaan Mebel	400.000.000,00	398.819.017,00	99,70
	7.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	600.000.000,00	599.400.000,00	99,90
	7.3	Pengadaan Aset Tak Berwujud	100.000.000,00	-	0,00
	8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.160.520.204,00	22.299.748.124,00	88,63
	8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	79.400.000,00	33.353.600,00	42,01
	8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.184.696.268,00	2.464.759.289,00	77,39
	8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181.400.000,00	175.290.000,00	96,63
	8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.715.023.936,00	19.626.345.235,00	90,38
	9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.039.355.386,00	5.354.305.629,00	76,06
	9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	2.000.000.000,00	1.595.047.591,00	79,75
	9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	2.789.635.180,00	1.760.598.978,00	63,11

			Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
		9.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	483.304.945,00	401.819.000,00	83,14
		9.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	1.766.415.261,00	1.596.840.060,00	90,40
II.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah			115.000.000,00	106.826.431,00	92,89
	1.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		115.000.000,00	106.826.431,00	92,89
		1.1	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	115.000.000,00	106.826.431,00	92,89
III.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			5.398.909.010,00	3.139.393.968,00	58,15
	1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		5.398.909.010,00	3.139.393.968,00	58,15
		1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	397.825.000,00	362.778.919,00	91,19
		1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	324.000.000,00	128.959.423,00	39,80
		1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.188.000.000,00	337.286.895,00	28,39
		1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.010.000.000,00	913.440.050,00	90,44
		1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	737.500.000,00	290.596.984,00	39,40
		1.6	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	422.507.400,00	274.338.573,00	64,93
		1.7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	92.900.000,00	21.767.110,00	23,43
		1.8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	496.581.260,00	358.325.750,00	72,16
		1.9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	50.300.000,00	34.018.860,00	67,63
		1.10	Penagihan Pajak Daerah	312.615.350,00	183.841.350,00	58,81
		1.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	27.000.000,00	11.720.204,00	43,41
		1.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	231.280.000,00	207.017.260,00	89,51
		1.13	Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	25.400.000,00	-	0,00
		1.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	83.000.000,00	15.302.590,00	18,44
	JUMLAH			231.980.748.044,00	190.018.241.762,00	81,91

c. Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100 \%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i

CKi : Capaian Keluaran i

Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan	Capaian Keluaran (Output) Kegiatan	Anggaran	
		Pagu (PAK)	Realsasi (RAK)
Keluaran 1 (dokumen)	0,7347	550.000.000,00	313.594.657,00
Keluaran 2 (SDM)	0,9623	165.313.566.382,00	150.826.263.498,00
Keluaran 3 (dokumen)	0,8336	28.000.000,00	15.000.000,00
Keluaran 4 (dokumen)	0,8872	333.000.000,00	264.238.050,00
Keluaran 5 (SDM)	0,8719	1.771.247.500,00	710.991.584,00
Keluaran 6 (laporan)	0,8562	27.137.150.320,00	24.754.866.809,00
Keluaran 7 (unit)	0,8283	9.677.151.963,00	9.458.251.845,00
Keluaran 8 (laporan)	0,8552	22.350.200.000,00	20.488.340.139,00
Keluaran 9 (unit)	0,8276	7.422.282.285,00	5.315.561.655,00
Keluaran 10 (laporan)	0,8671	220.000.000,00	209.331.072,00
Keluaran 11 (dokumen)	0,8970	6.933.438.300,00	4.656.837.746,00

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{11} ((550.000.000,00 \times 0,7347) - 313.594.657,00) + ((165.313.566.382,00 \times 0,9623) - 150.826.263.498,00) + \dots + U_{n11}}{\sum_{i=1}^{11} ((550.000.000,00 \times 0,7347) + (165.313.566.382,00 \times 0,9623) + \dots + U_{n11})} \times 100 \%$$

$$E = 3,23$$

Keterangan :

Batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah (20%) .

d. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan

Pengukuran konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dilakukan dengan menghitung rata-rata dari perbandingan antara hasil pengurangan akumulasi rencana penarikan dana dengan deviasi realisasi anggaran dan rencana penarikan dana kumulatif. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{RPDKn - |RPDKn - RAKn|}{RPDKn} \right) \times 100 \%}{n}$$

Keterangan :

- K : Konsistensi penyerapan anggaran terhadap Perencanaan
- RAK : Realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan ke i
- RPDK : Rencana penarikan dana kumulatif sampai dengan bulan ke n
- n : Jumlah bulan

Bulan	RPD	RPD Kumulatif	Realisasi Anggaran (RA)	RA Kumulatif
Januari	88.386.055.195,00	88.386.055.195,00	4.268.453.514,00	4.268.453.514,00
Februari	29.427.141.405,00	117.813.196.600,00	2.417.381.990,00	6.685.835.504,00
Maret	26.855.684.300,00	144.668.880.900,00	7.501.930.422,00	14.187.765.926,00
April	46.091.064.447,00	190.759.945.347,00	38.741.665.872,00	52.929.431.798,00
Mei	15.257.456.250,00	206.017.401.597,00	9.652.554.472,00	62.581.986.270,00
Juni	19.982.118.500,00	225.999.520.097,00	13.940.167.273,00	76.522.153.543,00
Juli	7.194.521.378,00	233.194.041.475,00	29.712.484.989,00	106.234.638.532,00
Agustus	2.622.303.614,00	235.816.345.089,00	11.210.486.504,00	117.445.125.036,00
September	1,00	235.816.345.090,00	8.668.553.252,00	126.113.678.288,00
Oktober	5.642.291.660,00	241.458.636.750,00	28.903.234.548,00	155.016.912.836,00
November	277.400.000,00	241.736.036.750,00	19.436.467.256,00	174.453.380.092,00
Desember	0,00	241.736.036.750,00	42.559.896.963,00	217.013.277.055,00

Dari tabel diatas, dapat dihitung nilai konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{RPDK bulan Januari (1)} &= 88.386.055.195,00 \\ \text{RAK bulan Januari} &= 4.268.453.514,00\end{aligned}$$

$$K = \left(\frac{\frac{88.386.055.195,00 - |88.386.055.195,00 - 4.268.453.514,00|}{88.386.055.195,00}}{1} \right) \times 100 \%$$

$$K = 4,83$$

Dengan metode analisis perhitungan yang sama, maka didapat nilai konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan per bulan sebagai berikut :

Bulan	Tingkat Konsistensi per Bulan (%)
Januari	4,83
Februari	5,67
Maret	9,81
April	27,75
Mei	30,38
Juni	33,86
Juli	45,56
Agustus	49,80
September	53,48
Oktober	64,20
November	72,17
Desember	89,77

Dari tabel di atas, pengukuran konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan adalah sebagai berikut :

$$K = \frac{4,83 + 5,67 + 9,81 + 27,75 + 30,38 + 33,86 + 45,56 + 49,80 + 53,48 + 64,20 + 72,17 + 89,77}{12}$$

$$K = 40,61$$

2. Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi Untuk mendapatkan nilai Kinerja, maka seluruh indikator (penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, pencapaian keluaran, dan efisiensi) harus memiliki skala yang sama, yaitu dari 0%- 100%. Dari keempat variabel pengukuran tersebut variabel efisiensi tidak memiliki skala 0%- 100%. Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai dalam rumus efisiensi sebesar (20%) dan nilai paling tinggi sebesar 20% . Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antar 0% sampai dengan 100%, dengan rumus sebagai berikut :

$$NE = 50 \% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah nilai skala maksimal (100%) dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah skala minimal (0%).

Dari hasil analisa, bahwa efisiensi yang diperoleh (E) = 3,23 %, maka nilai efisiensi :

$$NE = 50\% + \left(\frac{3,23}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 58,075$$

Selanjutnya, nilai Kinerja atas Aspek Implementasi dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara hasil pengukuran setiap variabel Aspek Implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat program atau satuan kerja. Rumus dari perhitungan tersebut sebagai berikut :

$$NKI = (P \times Wp) + (K \times Wk) + (CKP \text{ atau } CKK \times Wck) + (NE \times We)$$

Keterangan :

NKI : Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi

P : Penyerapan Anggaran

K : Konsistensi penyerapan anggaran terhadap
Perencanaan

CKP : Capaian Keluaran (*Output*) Program

CKK : Capaian Keluaran (*Output*) Kegiatan

NE : Nilai efisiensi

Wp : Bobot penyerapan anggaran

Wk : Bobot konsistensi penyerapan anggaran
terhadap perencanaan

Wck : Bobot capaian keluaran

We : Bobot efisiensi

Dimana, bobot masing – masing variabel aspek implementasi sebagai berikut :

Wp : 9,7 %

Wk : 18,2 %

Wck : 43,5 %

We : 28,6 %

Maka nilai (NKI) : $(P \times Wp) + (K \times Wk) + (CKP \times Wck) + (NE \times We)$

NKI : $(89,77 \% \times 9,7 \%) + (40,61 \% \times 18,2 \%) + (89,00 \% \times 43,5 \%) + (30,00 \% \times 28,6 \%)$

NKI : 63,39 %

Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan dari Perangkat Daerah tersebut sebesar 63,39 %, maka nilai Kinerja atas Aspek Implementasi Perangkat Daerah tersebut termasuk kategori Baik.

B. Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran Strategis

Capaian sasaran strategis dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik (Π) berdasarkan rata-rata ukur secara geometrik (Π) perbandingan antara capaian indikator Sasaran Strategis dan target indikator Sasaran Strategis. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$CSS = \prod_{i=1}^m \left(\left(\prod_{j=1}^n \frac{\text{Capaian Indikator Sasaran Strategis } i}{\text{Target Indikator Sasaran Strategis } i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \times 100 \%$$

Keterangan :

CSS : Capaian Sasaran Strategis

m : Jumlah Sasaran Strategis

n : Jumlah Indikator Sasaran Strategis

Sasaran Strategis / Outcomes	Indikator Sasaran Strategis (IKSS)		
	IKSS	Target (TIKSS)	Realisasi (RIKSS)
Sasaran Strategis 1 (SS.1)	IKSS ke 1	91,97	95,99
Sasaran Strategis 2 (SS.2)	IKSS ke 1	0,95	0,925
	IKSS ke 2	1,00	0,945
Sasaran Strategis 3 (SS.3)	IKSS ke 1	4,00	3,77

$$CSS = \left(\left(\left(\left(\frac{95,99}{91,97} \right) \times \left(\frac{0,925}{0,95} \times \frac{0,945}{1,00} \right)^{\frac{1}{2}} \right) \times \left(\frac{3,77}{4,00} \right) \right) \right) \times 100 \%$$

$$CSS = 94,00$$

2. Capaian Sasaran Program

Capaian Sasaran Program dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik (Π) berdasarkan rata-rata ukur secara geometrik (Π) perbandingan antara capaian indikator Sasaran Program dan target indikator Sasaran Program. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$CSP = \prod_{i=1}^m \left(\left(\prod_{j=1}^n \frac{\text{Capaian Indikator Sasaran Program } i}{\text{Target Indikator Sasaran Program } i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \times 100 \%$$

Keterangan :

CSP : Capaian Sasaran Program

m : Jumlah Sasaran Program

n : Jumlah Indikator Sasaran Program

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (ISP)		
	ISP	Target (ISP)	Realisasi (RISP)

Outcomes Program 1	ISP	94,54	90,44
Outcomes Program 2	ISP	94,46	95,15
Outcomes Program 3	ISP	93,64	67,16

$$CSP = \left(\left(\left(\frac{90,44}{94,54} \right) \times \left(\frac{95,15}{94,46} \right) \times \left(\frac{67,16}{93,64} \right) \right) \right) \times 100\%$$

$$CSP = 69,00$$

C. Penilaian Kinerja Anggaran Perangkat Daerah

1. Penilaian Kinerja Tingkat Perangkat Daerah

Penilaian Kinerja tingkat Perangkat Daerah dilakukan dengan menghitung rata-rata dari nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat tingkat Perangkat Daerah dan rata-rata nilai Kinerja Anggaran tingkat eselon III / program lingkup kewenangan Perangkat Daerah. Rumus pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$NKK = \frac{CSS + \text{rata - rata nilai kinerja anggaran tingkat eselon III/Program}}{2}$$

Keterangan :

NKK : Nilai Kinerja tingkat Perangkat Daerah

CSS : Capaian Sasaran Strategis/Nilai Kinerja
Perangkat Daerah atas Aspek Manfaat

$$NKK = \frac{94,00 \% + 69,00 \%}{2}$$

$$NKK = 81,50 \%$$

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Perangkat Daerah tersebut sebesar 81,50 %, maka nilai Kinerja Perangkat Daerah tersebut termasuk kategori Baik.

2. Penilaian Kinerja Tingkat Program

Penilaian Kinerja tingkat eselon III/program dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat dan Aspek Implementasi tingkat eselon III/program dan rata-rata nilai Kineja

Anggaran tingkat satuan kerja lingkup kewenangan eselon III/program terkait.

Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat dan Aspek Implementasi tingkat eselon III/program dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat eselon III/program dan nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat tingkat eselon III/program dengan bobot masing-masing aspek evaluasi Kinerja Anggaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{Nilai Kinerja atas Aspek Manfaat dan Implementasi} = (NKI \times Wi) + (CSP \times Wm)$$

Keterangan :

NKI : Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi

Wi : Bobot Aspek Implementasi

Wm : Bobot Aspek Manfaat

Bobot masing – masing aspek sebagai berikut :

Aspek Implementasi (Wi) = 33,3 %, terdiri dari :

Wp : 9,7 %

Wk : 18,2 %

Wck : 43,5 %

We : 28,6 %

Aspek Manfaat (Wm) = 66,7 %

$$(NKI \times Wi) + (CSP \times Wm) = (63,39 \% \times 33,3 \%) + (69,00 \% \times 66,7 \%) = 67,13 \%$$

Nilai Kinerja Anggaran tingkat eselon III/program tersebut sebesar 67,13%, maka nilai Kinerja eselon III/program tersebut termasuk kategori Baik.



A. Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran strategis penyelenggaraan Badan Pendapatan Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian organisasi dalam mendukung tujuan dan sasaran Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada dokumen RPJMD.

Mendasari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran strategis pelayanan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2025 – 2029. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Dokumen RPJMD dengan menjawab isu strategis, tantangan dan peluang sektor pendapatan dan permasalahan yang ada. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi RPJMD, dapat dicapai melalui salah tujuan Badan Pendapatan Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan. Tujuan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 - 2029 adalah "Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah"

Indikator pada Tujuan yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Tujuan Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 - 2029 disusun sebagai indikator kinerja outcomes dan bukan merupakan indikator kinerja output. Indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- ❖ Indeks kapasitas fiskal daerah pada tahun 2030 mencapai nilai indeks 2,074

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound and continuously improve* (SMART-C), maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien.

Sasaran strategis pendapatan daerah merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu kinerja outcome/impact dari beberapa program nomenklatur, kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran pendapatan dalam RPJMD Tahun 2025 - 2029 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pendapatan tahun 2020 - 2024 serta menjabarkan tujuan dan sasaran strategis dalam RPJMD. Dengan berlandaskan pada isu strategis dimaksud dan capaian/kesinambungan terhadap Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 – 2029.

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 - 2029 disusun sebagai indikator kinerja outcome dan bukan merupakan indikator kinerja output, yang dijabarkan menjadi 4 (empat) sasaran strategis dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Score Card* (BSC) yang dibagi dalam 4 (empat) perspektif yaitu *stakeholder perspective, costumer perspective, internal process perspective and learning and growth perspective*, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. *Stakeholders Perspective*

Mencakup SS.1 dengan Indikator Kinerja Utama :

- IKSS 1 Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (*revenue mobilization*)

- IKSS 2 Indeks Kemandirian Fiskal Daerah
- 2. *Customer Perspective*
Mencakup SS.2 dengan Indikator Kinerja Utama :
 - IKSS 3 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB;
- 3. *Internal Process Perspektive and Learning and Growth Perspektive*
Mencakup SS.3 dengan Indikator Kinerja Utama:
 - IKSS 4 Persentase Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD
 - IKSS 5 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

B. Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan data dan informasi penyusunan rencana kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan melihat hasil evaluasi kinerja 1 (satu) tahunan pelaksanaan tahun 2025 dan membandingkan dengan data dan informasi yang ada saat ini sesuai dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah, laju inflasi serta daya beli masyarakat.

Pengumpulan data dan informasi kinerja tersebut dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut :

1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis;
2. Mengumpulan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Jenis data dan informasi kinerja yang dibutuhkan sebagai berikut:

1. Data pertumbuhan kendaraan wajib pajak tahun 2018 – 2024;
2. Data kendaraan diatas air tahun 2018 – 2024;
3. Data target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2018 – 2024;

4. Data proyeksi penerimaan pendapatan daerah tahun 2025 – 2029 (amanah UU 1 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Data proyeksi penerimaan opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
6. Data penerimaan per jenis Retribusi tahun 2018 – 2024;
7. Data perbandingan dan proyeksi per jenis Retribusi (perbandingan UU Nomor 28 tahun 2009 dengan UU Nomor 1 tahun 2022);
8. Cascading pohon kinerja Renstra tahun 2025 – 2029;
9. Data proyeksi tujuan dan sasaran strategis tahun 2025 – 2029;
10. Data capaian indikator kinerja utama tahun 2018 – 2024;
11. Data realisasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Non Migas dan PDRB Konsumsi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2024
12. Data proyeksi untuk indikator kinerja utama tahun 2025 – 2029;
13. Data Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tahun 2018 – 2024;
14. Data neraca asset tahun 2018 – 2024;
15. Data jumlah pegawai tahun 2018 – 2024;
16. Data program/kegiatan/sub kegiatan serta realisasi anggaran tahun 2018 – 2024;
17. Data proyeksi program/kegiatan/ sub kegiatan serta kerangka pendanaan indikatif tahun 2025 – 2029;
18. Serta data lainnya yang dibutuhkan dalam analisis.

C. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN [Rp.]
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	218.600.000,00
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	73.000.000,00
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	73.000.000,00
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.600.000,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	165.329.148.028,00
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	165.009.908.028,00
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	199.240.000,00
2.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	120.000.000,00
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.200.000,00
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.200.000,00
4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	288.400.000,00
4.1	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	102.000.000,00
4.2	Pengolahan Data Retribusi Daerah	144.000.000,00
4.3	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	42.400.000,00
5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	682.800.000,00
5.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	16.800.000,00
5.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	372.800.000,00
5.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	293.200.000,00
6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.264.606.580,00
6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	390.069.080,00
6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	650.000.000,00
6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	250.000.000,00
6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.130.337.500,00
6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.300.000.000,00
6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	32.000.000,00
6.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.800.000,00
6.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	640.000.000,00
6.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.771.400.000,00
7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.400.000.000,00

	7.1	Pengadaan Mebel	1.000.000.000,00
	7.2	Pengadaan Aset Tak Berwujud	400.000.000,00
	8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.778.683.402,00
	8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.800.000,00
	8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.659.234.198,00
	8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198.800.000,00
	8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.883.849.204,00
	9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.587.134.082,00
	9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.307.134.082,00
	9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.630.000.000,00
	9.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300.000.000,00
	9.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.350.000.000,00
II.		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	120.800.000,00
	1.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	120.800.000,00
	1.1	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	120.800.000,00
III.		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.956.064.300,00
	1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.956.064.300,00
	1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	548.800.000,00
	1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	342.700.000,00
	1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2.106.800.000,00
	1.4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	510.000.000,00
	1.5	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	98.500.000,00
	1.6	Penetapan Wajib Pajak Daerah	70.000.000,00
	1.7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	546.003.720,00
	1.8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	40.000.000,00
	1.9	Penagihan Pajak Daerah	1.422.980.200,00
	1.10	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	20.000.000,00
	1.11	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	186.600.000,00
	1.12	Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	20.000.000,00
	1.13	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	60.200.000,00
		JUMLAH	225.667.956.012,00

C. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN [Rp.]
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		218.600.000,00
	1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	73.000.000,00
	1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	73.000.000,00
	1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.600.000,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		165.329.148.028,00
	2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	165.009.908.028,00
	2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	199.240.000,00
	2.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	120.000.000,00
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		25.200.000,00
	3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.200.000,00
4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		288.400.000,00
	4.1	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	102.000.000,00
	4.2	Pengolahan Data Retribusi Daerah	144.000.000,00
	4.3	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	42.400.000,00
5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		682.800.000,00
	5.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	16.800.000,00
	5.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	372.800.000,00
	5.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	293.200.000,00
6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		18.264.606.580,00
	6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	390.069.080,00
	6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	650.000.000,00
	6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	250.000.000,00
	6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.130.337.500,00
	6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.300.000.000,00
	6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	32.000.000,00
	6.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.800.000,00
	6.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	640.000.000,00
	6.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.771.400.000,00
7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.400.000.000,00
	7.1	Pengadaan Mebel	1.000.000.000,00
	7.2	Pengadaan Aset Tak Berwujud	400.000.000,00

	8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.778.683.402,00
	8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.800.000,00
	8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.659.234.198,00
	8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198.800.000,00
	8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.883.849.204,00
	9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.587.134.082,00
	9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.307.134.082,00
	9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.630.000.000,00
	9.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300.000.000,00
	9.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.350.000.000,00
II.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		120.800.000,00
	1.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	120.800.000,00
	1.1	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	120.800.000,00
III.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		9.956.064.300,00
	1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.956.064.300,00
	1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	548.800.000,00
	1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	342.700.000,00
	1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2.106.800.000,00
	1.4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	510.000.000,00
	1.5	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	98.500.000,00
	1.6	Penetapan Wajib Pajak Daerah	70.000.000,00
	1.7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	546.003.720,00
	1.8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	40.000.000,00
	1.9	Penagihan Pajak Daerah	1.422.980.200,00
	1.10	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	20.000.000,00
	1.11	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	186.600.000,00
	1.12	Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	20.000.000,00
	1.13	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	60.200.000,00
	JUMLAH		225.667.956.012,00

D. Jadwal Pelaksanaan Rencana Aksi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ RINCIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET KINERJA TRIWULAN				CAPAIAN KINERJA TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB	KET
							I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	2,02	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	1.422.980.200	0,505	1,01	1,515	2,02					Kepala Badan	
			2,02	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	510.000.000	0,505	1,01	1,515	2,02					Kepala Badan	
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Bapenda	84,07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.600.000	10	21	49	14,07					Kepala Badan	
3.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0,458	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	98.500.000	0,11	0,23	0,34	0,458					Kabid P2PATDA	
4.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	1,28	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	120.800.000	0,32	0,64	0,96	1,28					Kepala Bidang PDLL	
5.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1,252	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2.106.800.000	0,31	0,62	0,93	1,252					Kepala Bidang Pajak	
6.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	49,89	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	144.000.000	12,51	19,24	31,60	49,89					Kepala Bidang Wasbin	
7.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli	92,21	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	102.000.000	10	25	45	12,21					Kepala Bidang Pajak	

				Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	144.000.000									Kepala Bidang Pajak	
8.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi		6,00	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	546.003.720	0,5	2,5	2,0	1,0				Kepala Bidang P2PATDA	
9.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	1.1	Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,98	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	548.800.000	0,2	0,4	0,5	0,06				Kepala Bidang PDLL	
		1.2	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	1,18	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	342.700.000	0,12	1,1	0,3	0,2				Kepala Bidang Pajak	

NO.	SASARAN STRATEGIS LEVEL INTERMEDIATE OUTCOMES	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	TARGET KINERJA (TRIWULAN)				RINCIAN AKTIVITAS	RISIKO PENUGASAN	ANGGARAN	SATUAN	PELAKSANA	TARGET KEGIATAN (TRIWULAN)			
					I	II	III	IV						I	II	III	IV
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]				[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]			
1.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	2,02	0,505	1,01	1,515	2,02	Optimalisasi Pendapatan Daerah	Sinergi optimalisasi pendapatan bersama dengan Pansus DPRD Prov. Sumsel	1.422.980.200	6 bulan	Seluruh Bidang	10	50	20	20
										Sinergi dan kolaborasi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB	510.000.000	17 Kab/Kota	Seluruh Bidang	25	10	55	10
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Bapenda	Nilai	84,07	10	21	49	14,07	Penugasan kinerja sampai ke level staf pelaksana (<i>cascading</i>)	Evaluasi dan pemantauan kinerja secara berkala waktu	72.600.000	4 kali	Seluruh Bidang	15	30	45	10
3.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks	0,458	0,11	0,23	0,34	0,458	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Sinergi dan kolaborasi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB	98.500.000	17 Kab/Kota	Bidang P2PATDA	5	25	60	10
4.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	%	1,28	0,32	0,64	0,96	1,28	Sinergi dan koordinasi pendapatan transfer pusat	Konsolidasi fiskal dengan pemerintah pusat	120.800.000	4 kali	Bidang PDLL	15	35	45	5
5.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio	1,252	0,31	0,62	0,93	1,252	Pelaksanaan <i>door to door service</i>	Minimnya petugas penagihan yang berbasis kompetensi juru sita	2.106.800.000	8 kali	Bidang Pajak	10	50	20	20
6.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	12,51	19,24	31,60	49,89	12,51	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Optimalisasi objek retribusi daerah	144.000.000	2 semester	Bidang Wasbin	10	50	20	20

7.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)		%	92,21	10	25	45	12,21	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Minimnya sarana prasarana sebagai akibat luas jangkauan wilayah	102.000.000	4 kali	Bidang Pajak	20	40	30	10
										Pelaksanaan <i>door to door service</i>	Minimnya petugas penagihan yang berbasis kompetensi juru sita	2.106.800.000	8 kali	Bidang Pajak	10	50	20	20
										Optimalisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor	Jangkauan wilayah perairan sungai	548.800.000	2 kali	Bidang Pajak	25	30	25	20
8.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi		%	6,00	0,5	2,5	2,0	1,0	Ekstensifikasi penerimaan pajak daerah	Terbatasnya sumber potensi penerimaan pajak daerah	546.003.720	1 kali	Bidang P2PATDA	15	30	45	10
9.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	1.1	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	%	0,98	0,2	0,4	0,5	0,06	Diversifikasi penerimaan pajak daerah	Masih terdapatnya tunggakan penerimaan pajak daerah	548.800.000	1 kali	Bidang Pajak	25	10	55	10
		1.2	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	Rasio	1,18	0,12	1,1	0,3	0,2	Intensifikasi penerimaan pajak daerah	Masih terdapatnya wajib pajak yang non aktif	342.700.000	2 kali	Bidang Pajak	10	30	50	10

NO.	SASARAN STRATEGIS LEVEL INTERMEDIATE OUTCOMES	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ RINCIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET KINERJA TRIWULAN				CAPAIAN KINERJA TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB	KET
							I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1.	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap GDP	1,73	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2.106.800..000	0,61	0,5	0,5	0,12					Bidang Pajak	
2.	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	14,81	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	510.000.000	4,53	3,28	4	3					Bidang Pajak	
3.	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	5,02 %	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	1.422.980.200	1,02	2	1	1					Bidang Pajak	
4.	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	100 %	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	umlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	40.000.000	25	25	25	25					Bidang Pajak	
5.	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	95,43	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	42.400.000	20	25	45	5,43					Bidang PDLL	
6.	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	89,78	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	144.000.000	10	30	40	9,78					Bidang PDLL	
7.	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	83,93	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	120.800.000	25	10	35	13,93					Bidang PDLL	

8.	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	84,83	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	102.000.000	10	40	20	14,83					Bidang PDLL	
9.	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	3	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	umlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	186.600.000	3	3	3	3					Bidang Pengawasan dan Pembinaan	
10.	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	92,91	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi daerah	20.000.000	10	35	35	12,91					Bidang Pengawasan dan Pembinaan	
11.	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	16,85	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi daerah	20.000.000	5,03	4,82	4	3					Bidang Pengawasan dan Pembinaan	
12.	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan dalam Pelaksanaan Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	12,74	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	186.600.000	3,74	2	4	3					Bidang Pengawasan dan Pembinaan	
13.	Meningkatnya Penggalan Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	82,19	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	548.800.000	15	25	25	16,19					Bidang P2PATDA	

14.	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah		83,81	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	342.700.000	10	20	30	23,81						Bidang P2PATDA	
15.	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama		93,62	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	342.700.000	10	20	30	33,62						Bidang P2PATDA	
16.	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi		100,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	342.700.000	25	25	25	25						Bidang P2PATDA	
17.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	94,96	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	120.000.000	20	20	30	24,96						Sekretariat	
		1.1	Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	4,92	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	73.000.000	1	2	1	1,01						Sekretariat	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	73.000.000	1	2	1	1,01						Sekretariat	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.600.000	1	2	1	1,01						Sekretariat	
		1.2	Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	80,92	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	243.500.000	5	25	30	20,92						Sekretariat	

					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	372.800.000	5	25	30	20,92					Sekretariat	
					Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	293.200.000	5	25	30	20,92					Sekretariat	
18.	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	62,67	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.771.400.000	10	20	20	12,67						UPTB Puslia	
19.	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	Persentase Meningkatnya Kerjasama	91,54	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	342.700.000	10	30	30	21,54						UPTB Puslia	
20.	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	79,21	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.771.400.000	15	25	20	18,21						UPTB Puslia	
21.	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	41,78	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.771.400.000	5	10	15	11,78						UPTB Puslia	
22.	Meningkatnya Kecepatan Internet	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs	100	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.771.400.000	25	25	25	25						UPTB Puslia	
23.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	100	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	546.003.720	25	25	25	25						UPTB PPD Wilayah Kabupaten Kota se Sumatera Selatan	
24.	Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggakan Pajak	8,62	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	1.422.980.200	2	3	2	1,62						UPTB PPD Wilayah Kabupaten Kota se Sumatera Selatan	

25.	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	9,60	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	70.000.000	2	2	3	2,60					UPTB PPD Wilayah Kabupaten Kota se Sumatera Selatan	
-----	--	---	------	------------------------------	--	------------	---	---	---	------	--	--	--	--	--	--

NO.	SASARAN STRATEGIS LEVEL INTERMEDIATE OUTCOMES	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	TARGET KINERJA (TRIWULAN)				RINCIAN AKTIVITAS	RISIKO PENUGASAN	ANGGARAN	SATUAN	PELAKSANA	TARGET KEGIATAN (TRIWULAN)			
					I	II	III	IV						I	II	III	IV
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]				[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]			
1.	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap GDP	%	1,73	0,61	0,5	0,5	0,12	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Minimnya sarana prasarana media penyampaian diseminasi pajak daerah	2.106.800.000	4 kali	Bidang Pajak	10	50	20	20
2.	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	%	14,81	4,53	3,28	4	3	Penetapan wajib pajak daerah	Masih terdapatnya objek wajib pajak baru yang belum ditetapkan	510.000.000	1 kali	Bidang Pajak	5	25	60	10
3.	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	%	5,02	1,02	2	1	1	Penagihan pajak daerah	Masih terdapatnya pengajuan doleansi pajak daerah	1.422.980.200	2 kali	Bidang Pajak	15	35	45	5
4.	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	%	100	25	25	25	25	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Masih terdapatnya kesalahan dalam pembukuan dan pelaporan pajak daerah	40.000.000	4 kali	Bidang Pajak	25	25	25	25
5.	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	Rasio	95,43	20	25	45	5,43	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Masih terdapatnya potensi retribusi yang belum digali untuk peningkatan PAD	42.400.000	2 kali	Bidang PDLL	5	15	60	20
6.	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	%	89,78	10	30	40	9,78	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kerjasama pemanfaatan terhadap objek retribusi masih belum optimal	144.000.000	1 kali	Bidang PDLL	10	60	20	10

7.	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	%	83,93	25	10	35	13,93	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Pola intensifikasi belum optimal terhadap penerimaan pusat	120.800.000	4 kali	Bidang PDLL	15	15	60	10
8.	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	%	84,83	10	40	20	14,83	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Belum optimalnya penerimaan hibah	102.000.000	4 kali	Bidang PDLL	20	20	45	15
9.	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	Nilai	3	3	3	3	3	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Belum optimalnya penerapan pengendalian intern pemerintah	186.600.000	4 kali	Bidang Pengawasan dan Pembinaan	15	40	25	20
10.	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	%	92,91	10	35	35	12,91	Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Belum optimalnya pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah	20.000.000	2 kali	Bidang Pengawasan dan Pembinaan	5	45	30	20
11.	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	%	16,85	5,03	4,82	4	3	Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Masih terdapatnya pelanggaran dalam pendapatan daerah	20.000.000	2 kali	Bidang Pengawasan dan Pembinaan	5	45	30	20
12.	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan dalam Pelaksanaan Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	%	12,74	3,74	2	4	3	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Masih terdapatnya pelaksanaan yang belum tertib sesuai dengan SOP	186.600.000	4 kali	Bidang Pengawasan dan Pembinaan	15	40	25	20

13.	Meningkatnya Penggalan Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah		%	82,19	15	25	25	16,19	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Pengembangan pajak daerah belum sepenuhnya mengacu pada kemampuan dan kapasitas daerah	548.800.000	1 kali	Bidang P2PATDA	5	65	20	10
14.	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah		%	83,81	10	20	30	23,81	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Penelitian berbasis atas daya dukung daerah belum optimal	342.700.000	1 kali	Bidang P2PATDA	10	25	35	30
15.	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama		%	93,62	10	20	30	33,62	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Belum optimalnya penggalan sumber retribusi baru bagi daerah	342.700.000	4 kali	Bidang P2PATDA	5	35	45	10
16.	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi		%	100,00	25	25	25	25	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Masih terdapatnya kebijakan yang belum diharmonisasi terkait dengan kebijakan investasi daerah	342.700.000	1 kali	Bidang P2PATDA	15	15	65	5
17.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	%	94,96	20	20	30	24,96	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Masih terdapatnya jurnal koreksi atas pertanggungjawaban keuangan	120.000.000	4 kali	Sekretariat	10	40	30	20
		1.2	Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	%	4,92	1	2	1	1,01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Masih terdapatnya GAP antara dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	73.000.000	2 kali	Sekretariat	15	30	45	10

										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja dilakukan secara berkala	72.600.000	4 kali	Sekretariat	15	30	45	10
										Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Evaluasi kinerja anggaran terhadap sasaran strategis belum optimal	73.000.000	2 kali	Sekretariat	15	30	45	10
		1.3	Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	%	80,92	5	25	30	20,92	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan tugas ASN belum optimal	372.800.000	4 kali	Sekretariat	20	15	45	20
										Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Masih minimnya pegawai yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kinerja ASN	372.800.000	4 kali	Sekretariat	20	15	45	20
										Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Peningkatan capacity building bagi pegawai terhadap peraturan terkait kinerja ASN	293.200.000	4 kali	Sekretariat	20	15	45	20
18.	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	%	62,67	10	20	20	12,67	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Masih rendahnya penggunaan digitalisasi dalam SPBE	7.771.400.000	4 kali	UPTB Puslia	15	45	30	10	
19.	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	Persentase Meningkatnya Kerjasama	%	91,54	10	30	30	21,54	Meningkatnya modern channel	Belum optimalnya kerjasama layanan e commerce pada pembayaran pajak	342.700.000	1 kali	UPTB Puslia	10	50	20	20	

20.	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	%	79,21	15	25	20	18,21	Pengembangan digitalisasi dalam pembayaran pajak daerah	Belum optimalnya layanan berbasis digitalisasi	7.771.400.000	1 kali	UPTB Puslia	10	50	20	20
21.	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	%	41,78	5	10	15	11,78	Pemeliharaan asset tak berwujud	Masih rendahnya tingkat keamanan system informasi basis pajak daerah	7.771.400.000	2 kali	UPTB Puslia	15	30	30	25
22.	Meningkatnya Kecepatan Internet	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs	MBPs	100	25	25	25	25	Peningkatan akses internet pada blank spot area	Masih terdapatnya blank spot area	7.771.400.000	4 kali	UPTB Puslia	20	35	35	10
23.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	%	100	25	25	25	25	Optimalisasi pendapatan pajak daerah	Masih rendahnya partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak daerah	546.003.720	4 kali	UPTB PPD Wilayah Kabupaten Kota se Sumatera Selatan	10	45	35	10
24.	Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggakan Pajak	%	8,62	2	3	2	1,62	Optimalisasi pelaksanaan door to door service	Masih terdapatnya tunggakan dalam pembayaran pajak daerah	1.422.980.200	4 kali	UPTB PPD Wilayah Kabupaten Kota se Sumatera Selatan	20	25	45	10
25.	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	%	9,60	2	2	3	2,60	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Masih terdapatnya kesalahan perhitungan sesuai dengan NJKB	70.000.000	1 kali	UPTB PPD Wilayah Kabupaten Kota se Sumatera Selatan	15	30	45	10



Rencana Aksi Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 disusun sebagai bagian dari dokumen perencanaan kinerja sebagaimana yang di amanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah untuk menjaga kesinambungan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang didalamnya menggambarkan target kinerja dan rincian aktivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan sebagai alat atau proses mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Dokumen rencana aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi dan kebijakan penyelenggaraan program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan aspek penilaian kinerja yang dilakukan melalui evaluasi dan pemantauan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2026.

Rencana aksi kinerja ini telah mempertimbangkan pencapaian target kinerja pelaksanaan beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak (*stakeholder*) sebagai bentuk *cross cutting*, pengendalian intern, pengelolaan manajemen risiko dari setiap program/kegiatan/sub kegiatan utama sehingga diharapkan tidak mengganggu pencapaian target kinerja masing masing yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Indikator kinerja dalam rencana aksi kinerja ini telah dilakukan penyesuaian terutama untuk menjawab (*critical success factor*) pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam kerangka *logical framework* yang memadai. Aspek capaian kinerja yang telah baik pada periode sebelumnya tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan, sedangkan aspek capaian kinerja yang belum baik akan terus dilakukan

pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaannya secara berkala waktu dan berjenjang sesuai dengan level kewenangannya masing – masing.

Semoga Rencana Aksi Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 ini menjadi pedoman dan kerangka acuan dalam melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada urusan bidang keuangan sub urusan pendapatan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19810923 200012 1 001